



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 353);
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Kabupaten Wonogiri.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah untuk menyusun program kerja pengawasan tahunan.
- (2) Tujuan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah :
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah.
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pengawasan APIP.

BAB III

SASARAN

Bagian Pertama

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Pasal 3

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
2. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
3. penguatan tata kelola, implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
4. peningkatan kapabilitas APIP.

Bagian Kedua

Fokus Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Pasal 4

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dengan fokus :

1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan program unggulan Bupati.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan/audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan/audit kinerja berbasis risiko
2. Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yaitu :
 - a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah dengan fokus :
 - 1) rancangan akhir rencana kerja pemerintah Daerah;
 - 2) kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS);
 - 3) rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

- b. pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dengan fokus :
- 1) akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah;
 - 2) akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah;
 - 3) pengelolaan pembiayaan Daerah;
 - 4) pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - 5) pengelolaan barang milik Daerah;
- c. reviu laporan keuangan, memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
- d. kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus :
- 1) *probity audit*;
 - 2) reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - 4) pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
 - 5) evaluasi atas perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
 - 6) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 7) monitoring *database* aset desa;
 - 8) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 9) evaluasi penyerapan anggaran & Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - 10) pengawasan terhadap manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 11) reviu Satuan Standar Harga (SSH)/Analisis Standar Belanja (ASB);
 - 12) reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 13) reviu tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - 14) reviu tata kelola perizinan/non perizinan
 - 15) penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 - 16) reviu tata kelola pajak Daerah;
 - 17) reviu tata kelola Barang Milik Daerah (BMD);
 - 18) pendampingan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - 19) reviu laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, afirmasi dan kinerja.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas dengan fokus :
 - a. rencana pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan*);
 - b. pengendalian *gratifikasi*;
 - c. pelaksanaan survei penilaian integritas;
 - d. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
 - e. pengawasan pembangunan reformasi birokrasi (penguatan pengawasan);
 - f. capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - g. capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;
 - h. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - i. monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dan *whistle blowing system* (WBS);
 - j. pemeriksaan investigatif/kasus;
 - k. tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
 - l. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
4. peningkatan kapabilitas APIP dengan fokus :
 - a. kapabilitas APIP level 3;
 - b. maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); dan
 - e. pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Pasal 5

Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Desember 2022



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 57
NOMOR